

## INOVASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENEKAN KKN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Anggit Saputro<sup>1</sup>, Karningsih<sup>2</sup>, Bambang Martono<sup>3</sup>

FISIP UNTAG SEMARANG Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang,  
Jawa Tengah, Indonesia

Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP UNTAG Semarang  
Jl. Pawiyatan luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

email: [anggitsaputro591@gmail.com](mailto:anggitsaputro591@gmail.com)<sup>1</sup>, [karningsih@untagsmg.ac.id](mailto:karningsih@untagsmg.ac.id)<sup>2</sup>,  
[bambang-matono@untagsmg.ac.id](mailto:bambang-matono@untagsmg.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan clean government dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menekan Korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga memberikan kepuasan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat yang mudah, murah dan cepat. Fokus penelitian ini meliputi inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menekan Korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lokus penelitian di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan berbagai manfaat baik bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan kewajiban penyediaan pelayanan publik yang prima. Manfaat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah indeks kepuasan masyarakat, menciptakan pola kerja yang Clean Government dan Good Government.

**Kata Kunci:** Inovasi, Reformasi Birokrasi, KKN, Jawa Tengah

### Abstack

*Bureaucratic reform is not just a demand from all elements of society who expect that bureaucracy and especially for civil servants have a better quality. Therefore, the government reaffirm to reform the bureaucracy to realize clean government and good governance in government. The purpose of this research is to analyze how the Central Java Provincial Government pushed corruption in Central Java Provincial Government environment, so can give optimal public service to society that is easy, cheap and fast. The focus of this research includes innovations of the Central Java Provincial Government in suppressing corruption. The research locus is in Central Java Provincial Government. The results of the study show various benefits for the Central Java Provincial Government as executor of implementation the obligation to provide excellent public services. Benefits for the Central Java Provincial Government, society satisfaction index, to expand dynamic bureucratic reform, and creating a clean government and good government work model.*

**Keywords:** Research, Bureaucratic reform, KKN, Central Java

## **PENDAHULUAN**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui Reformasi birokrasi, dilakukan penataan system penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara singkat Reformasi birokrasi sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Tujuan dari Reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan public.

Dalam penyelenggaraan pelayanan public tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan public kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap 8 area perubahan terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan dan Penguatan Organisasi, penataan Peraturan Perundang – Undangan, Penataan Sumber Daya Manusia, Penataan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Korupsi di Indonesia seperti penyakit yang sudah sangat akut. Berbagai penawar sudah diberikan akan tetapi penyakit tersebut tak kunjung sembuh. Prakti Korupsi telah menggejala dan telah menjangkiti hampir semua lini kehidupan, tak terkecuali pada ranah pelayanan public di birokrasi pemerintahan. Sekotar pelayanan public menjadi salah satu lahan yang paling basah terkait korupsi ini. sehingga tidak mengherankan, jika kasuk-kasu seperti pungutan liar, gratifikasi dan sejenisnya kerap kali terjadi area ini. Alhasil, birokrasi tidak lagi berjalan efektif dan efisien. Birokrasi pada akhirnya hanya menjadi pelynan penguasa dan oknum-oknum yang mehalalkan segala cara korupsi sebagaimana digambarkan oleh Larmour (2007) menjauhkan

diri dari tipe ideal sebuah negara yang semestinya harus memenuhi fungsi-fungsi keadilan pelayanan public (*the fairness of Public Service*), persamaan terhadap masyarakat (*the equality of society*), dan kemerdekaan dalam kompetisi ekonomi (*the freedom for economic competition*).

Korupsi di sector pelayan public umumnya lebih disebabkan oleh dua factor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarakat memperoleh proses pelayanan yang cepat dalam berbagai urusan. Factor internal lebih menitikberatkan pada adanya fenomena bahwa rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk mempersulit dan memperlana proses pengurusan administrasi. Peluang korupsi kemudian terjadi ketika kebutuhan untuk mendapatkan layanan secara cepat dari masyarakat datang pada saat bersamaan disambut dengan adanya keinginan oknum tertentu di birokrasi untuk mengeruk keuntungan secara illegal.

Desakan reformasi birokrasi mengharuskan keterlibatan pemerintah masyarakat dan ASN. Penggunaan e-government paling baik terkait erat dengan pelaksanaan prioritas pembangunan. Upaya memperbaiki birokrasi dari berbagai patologi birokrasi cepat atau lambat untuk meminimalisir korupsi yang menjadi ancaman bangsa Indonesia.

Ide pembaruan dalam birokrasi sebetulnya sudah ada sejak lama. Namun Gagasan Pembaruan belum cukup populer dalam ranah birokrasi. Hal ini disebabkan pengaruh kuat hegemoni dari prinsip-prinsip birokrasi weber. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayaangunaan Telematika di Indoensia yang bertujuan untuk mendorong penggunaan teknologi telematika guna mensukseskan target good governane serta mengakselerasi terwujudnya demokrasi yang dicita-citakan telah mempopulerkan istilah E-Government. Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradgima dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi dan nepotisme, mampu melayani public secara akuntabel serta memegang teguh “MBOTEN KORUPSI, MBOTEN KORUPSI”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian ini sejalan dengan tujuan penelitian kualitatif dalam bentuk fenomenologi, yang mencakup informasi tentang fenomena utama berupa kejadian e-government sebagai inovasi birokrasi pemerintahan anti korupsi.

Kekuatan penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa refrensi, jurnal dan berbagai media informasi yang relevan dan valid. Analisis data dilakukan dengan data dari teori dan jurnal terbaru. Dan berbagai sumber relevan lainnya. Ini dilakukan untuk memvalidasi data penelitian. Jenis penelitian ini sejalan dengan tujuan penelitian kualitatif dalam bentuk fenomenologi, yang mencakup informasi tentang fenomena utama berupa kebijakan e-government sebagai inovasi pemerintah daerah anti korupsi. Ini dilakukan untuk memvalidasi data (Cresswell 2014).

## **PEMBAHASAN**

Menurut Dewandaru Sigit (2013: 332) reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Melihat pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Gejala menjalarnya praktik korupsi dalam pelayanan public terjadi karena factor internal dan eksternal. Sebagaimana diuraikan di atas. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh proses pelayanan yang cepat dalam berbagai urusan. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Sedangkan factor internal lebih menitikberatkan pada adanya fenomena bahwa rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk mempersulit dan meperlama proses pengurusan administrasi.

Mike David menekankan bahwa perubahan yang konstan dan fleksibilitas merupakan syarat untuk memulai birokrasi yang inovatif. Pembaruan birokrasi organisasi membutuhkan innovator. Seorang Pemimpin harus mampu menjelaskan konsep pembaharuan secara sistematis, mampu menjelaskan secara jelas tentang tujuan dan langkah serta bagaimana proses adopsi konsep tersebut dilaksanakan dan harus memiliki jiwa curiosity, honesty dan ownership dalam melakukan inovasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai visi yang sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023, yaitu: "MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI 'Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi'". Adapun misinya adalah sebagai berikut:

- Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
- Misi 4: Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Pada Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Pemberantasan korupsi merupakan agenda utama pembangunan masyarakat dan reformasi birokrasi. Tindakan korupsi telah mengakar begitu kuat dan menjadi bahaya laten yang mengikis moral masyarakat. Korupsi merupakan masalah serius yang harus diselesaikan. Karena itulah, perlu upaya untuk membudayakan anti korupsi di Indonesia

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memetakan area potensi korupsi dengan empat kategori yaitu APBD, Pengadaan Barang/Jasa, Pelayan Publik, Kepegawaian. untuk mencegah terjadinya korupsi dan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat komitmen dari Tagline “Mboten Korupsi Mboten Korupsi” seperti Pencanaan Zona Integritas, Pakta Integritas antara Gubernur dengan Ketua DPBD serta seluruh Kepala OPD, BUMD, Transparansi kekayaan dan penandatanganan Peraturan Kepala Daerah tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi oleh seluruh Bupati/Walikota se Jawa Tengah.

Strategi dalam Pengembangan Digitalisasi Pemerintahan atau Digital Leadership yaitu Visi Kuat, Kearifan Lokal, Inovasi Digital dan Orientasi Layanan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya membuat komitmen akan tetapi membangun sistem digitalisasi pemerintahan, antara lain sistem dengan penerapan *e-government*, *e-budgeting*, perbaikan pengelolaan informasi publik, hingga penggunaan sosial media sebagai saluran informasi langsung kepada masyarakat, serta pelaksanaan Monitoring Center of Prevention (MCP) di bawah supervisi dari KPK-RI, membangun zona integritas Integrasi sistem *e-budgeting* sd *e-kinerja*, Perbaikan Sistem Layanan Publik di OPD, Penerapan SPIP & Mitigasi Resiko di OPD, Kolaborasi Cegah Korupsi antara APIP & KPK RI dan Kolaborasi APIP, APH & BPKP.

Strategi tersebut membawa dampak kepada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengurangi Praktek Korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

## **KESIMPULAN**

Penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan merupakan kebijakan politik yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemberantasan tindak korupsi di Jawa Tengah (Pengembangan, Direktorat Penelitian dan 2007). Sekalipun sudah ada inovasi dalam pelayanan public bukan berarti dapat memberantas KKN secara tuntas tetapi dapat meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Maka pemimpin harus menegakan aturan-aturan yang ketat dan tenaga pelayanan birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi memadai. Birokrasi semacam ini adalah tipe birokrasi yang ideal yang bekerja dalam rangka melayani secara professional. Birokrasi yang dijalankan secara professional dapat menerapkan pengawasan serta pemberian reward and punishment. Sedangkan strategi kedua yaitu penguatan kapasitas sumber daya manusia. Birokrasi yang professional harus senantiasa diisi oleh orang – orang yang professional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi  
2020-2024

Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayaangunaan  
Telematika

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun  
2018 -2023

Larmour, Peter 2007, ‘A short Introduction to Corruption and Anti Corruption’, CIES e-  
Working Paper, No. 37

Cresswell. 2014. *Research Design:Qualitative,Quantitative, and Mixed Method*. 4th ed.  
Thousand Oaks.

Pengembangan, Direktorat Penelitian dan, KPK. 2007. “Mencegah Korupsi Melalui E-  
Procurement.”